

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA PERIMBANGAN, INVESTASI SWASTA,
TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI ERA DESENTRALISASI FISKAL
TAHUN 2005-2009 (STUDI KASUS
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MOCHAMAD RIZKY AZZUMAR
NIM. C2B607039

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Mochamad Rizky Azzumar
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607039
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
INVESTASI SWASTA, TENAGA
KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI ERA DESENTRALISASI
FISKAL TAHUN 2005-2009 (STUDI
KASUS KABUPATEN/KOTA PROVINSI
JAWA TENGAH)**
Dosen Pembimbing : Dra. Herniwati Retno Handayani, MS.

Semarang, 7 Desember 2011

Dosen Pembimbing,

(Dra. Herniwati Retno Handayani, MS.)
NIP. 19551 128 198103 2004

Mengetahui,
a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE, M.Com, PhD.Akt
NIP. 196708091992031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Mochamad Rizky Azzumar
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607039
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA PERIMBANGAN, INVESTASI
SWASTA, TENAGA KERJA TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI ERA
DESENTRALISASI FISKAL TAHUN 2005-
2009 (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 23 Desember 2011

Tim Penguji

1. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS. (.....)
2. Dra. Johana Maria Kodoatie, M.Ec, Ph.D. (.....)
3. Fitrie Arianti, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui,
a.n. Dekan,
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE, M.Com, PhD.Akt
NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mochamad Rizky Azzumar, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)** adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Desember 2011

Yang Membuat Pernyataan,

Mochamad Rizky Azzumar
NIM. C2B006039

ABSTRACT

In order to implement regional development, the central government imposed a system of fiscal decentralization. Where local governments can regulate and allocate regional income independently. Fiscal decentralization policy have been implemented in 2001 which serves to increase regional income and develop all economic potentials that exist, so it can spur an increase in output and increase economic activity, and finally will impact on improve social welfare. During 5 years of fiscal decentralization in the province of Central Java is known that the period 2005-2009, economic growth of 35 districts/cities in Central Java province increased every year, but the increases are not occurring at the same time reducing the gap in each region. From the data obtained in mind the average amount of GDP based on constant 2000 prices in the largest there are only three regions, consisting of Semarang City, Cilacap District, and Kudus District.

This research aims to find out the influence of variable original local income (PAD), balance fund, private investment, labour on economic growth district or city in Central Java in 2005-2009 fiscal decentralization. The data of this research is panel data using secondary time series data and secondary cross section data. Data collected were analyzed with panel data with eviews 6 program. The method used in this research is the OLS (Ordinary Least Square) with a fixed effect model or LSDV (Least Square Dummy Variable).

From the research revealed that there is a positive influence among original local income (PAD), balance fund, private investment, and labour. However, balance fund and private investment does not significantly affect economic growth. Unlike the case with original local income and labour have significant impact on economic growth.

Keywords: fiscal decentralization, economic growth, original local income (PAD), balance fund, private investment, labour

ABSTRAK

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah pusat memberlakukan sistem desentralisasi fiskal. Di mana pemerintah daerah dapat mengatur dan mengalokasikan secara mandiri penerimaan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan pada tahun 2001 difungsikan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengembangkan seluruh potensi-potensi ekonomi yang ada, sehingga dapat memacu peningkatan output maupun meningkatkan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selama 5 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah yaitu periode tahun 2005-2009 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat tiap tahunnya, tetapi peningkatan tersebut tidak sekaligus mengurangi kesenjangan yang terjadi di tiap daerah. Dari data yang diperoleh diketahui rata-rata jumlah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 terbesar hanya terdapat di tiga daerah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kudus.

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2009 di era desentralisasi fiskal. Jenis data penelitian ini adalah data panel (Pooled data) dengan menggunakan data sekunder berdasarkan urutan waktu (time series) dan berdasarkan urutan observasi (cross section). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik data panel menggunakan program *evIEWS 6*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (*Ordinary Least Square*) dengan pendekatan *fixed effect* atau LSDV (*Least Square Dummy Variabel*).

Dari hasil penelitian diketahui ada pengaruh yang positif antara pendapatan asli daerah, dana Perimbangan, investasi Swasta, dan tenaga kerja. Akan tetapi dana perimbangan dan investasi swasta tidak berpengaruh signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya dengan pendapatan asli daerah dan tenaga kerja yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, PAD, dana perimbangan, investasi swasta, tenaga kerja.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi penulis, atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan, saran dan kerja sama dari berbagai pihak. Melalui tulisan yang sederhana ini, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya ditujukan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M. Si, Akt., Ph.D selaku dekan fakultas ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. H. Waridin Ms., Ph.D selaku Dosen Wali yang telah sabar mendampingi dan membimbing penulis dan teman-teman IESP angkatan 2007.
3. Ibu Dra. Herniwati Retno Handayani, MS. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, khususnya Jurusan IESP atas bimbingan dan pengajaran yang diberikan dalam masa studi penulis. Seluruh staf, karyawan Fakultas Ekonomi yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan pelayanan yang baik.

5. Bapak Kusno dan Mas Nanang selaku petugas BPS Jawa Tengah yang telah membantu dalam memperoleh data.
6. Ibu Riyanti dan Mbak Yossi selaku karyawan BPMD Jawa tengah, terima kasih atas segala bantuannya dan informasinya kepada penulis.
7. Ayahku tercinta Drs. Mochamad Djunaedi, MM dan Mamaku tersayang Yuliawati yang selama ini senantiasa sabar dalam membimbing ,berdoa serta memberikan arahan dalam pendidikan anak-anaknya. Terima kasih karena telah menjadi motivator hidup agar selalu tetap di jalan yang benar. Doa dan dukungan kalian merupakan anugerah terindah.
8. Adik-adikku tersayang Mochamad Luthfi Raditya, Rizka Putri Amalina, Mochamad Farid Naufal, dan Mochamad Zahid Faturrahman yang telah menjadi motivasi dan pemacu semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Semangat dan dukungan kalian sangat berharga bagi penulis.
9. Keluarga besar Lenteng Agung yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas dukungan moral dan doanya kepada penulis.
10. Teruntuk Lia Natalia, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan selama ini. Dirimu yang selalu memberikan semangat, masukan, doa dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih sayang.
11. Untuk Om dan Tante terima kasih untuk pencerahan dan nasihatnya selama ini. Seluruh keluarga di Karangasem kuningan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Serta seluruh karyawan 21 arloji terima kasih untuk dukungan dan doanya kepada penulis.
12. Untuk sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan : Bagus Ardyanto, Suhael Ishaq, Asman Al Faiz, I Made Yogatama, Teguh Heri S, Teguh yang telah menemani penulis disaat susah dan senang selama ini. Terima kasih untuk persahabatan kalian.
13. Teman-teman kost Banjarsari 61 : Faqih, Imam, Afif yang selalu membantu menghilangkan penat saat menulis skripsi ini. Terus jaga selalu kekompakkannya.

14. Teman–teman IESP : Arjangga, Surya Nugraha, Akbar Sisputro, dan teman seperjuangan IESP angkatan 2007 atas kebersamaan dan kenangan yang tak terlupakan.
15. Teman KKN Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran (Pungki Agus, Nerfi, Dyah, Fara, Intan, dan Vila) terima kasih atas pengalaman yang menyenangkan.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan dan pencapaian hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
1.4 Sistematika Penulisan	27
BAB II TELAAH PUSTAKA	29
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	29
2.1.1 Desentralisasi Fiskal di Indonesia	29
2.1.2 Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan ekonomi	34
2.1.3 Penerimaan Daerah (Komponen Desentralisasi Fiskal)	36
2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36
2.1.3.2 Dana Perimbangan	36
2.1.3.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)	37
2.1.3.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	37
2.1.3.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	39
2.1.3.3 Pinjaman Daerah	39
2.1.3.4 Lain-lain Pendapatan	40
2.1.4 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	40
2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi	41
2.1.5.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	41
2.1.5.2 Teori Adam Smith (1723-1790)	42
2.1.5.2.1 Pertumbuhan Output Total	43
2.1.5.2.2 Pertumbuhan Penduduk	44
2.1.5.3 Teori Harrod-Domar	44
2.1.5.4 Teori Solow-Swan	46
2.1.6 Pengertian Tenaga Kerja	47
2.1.7 Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi	48
2.1.8 Investasi	49
2.1.9 Investasi Swasta dan Infrastruktur Daerah	51
2.1.10 Penelitian Terdahulu	51
2.2 Kerangka Pemikiran	59
2.3 Hipotesis	61

BAB III	METODE PENELITIAN	62
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	62
3.1.1	Variabel Penelitian	62
3.1.2	Definisi Operasional	62
3.2	Jenis dan Sumber Data	63
3.3	Metode Pengumpulan Data	65
3.4	Metode Analisis	65
3.4.1	Analisi Regresi	66
3.4.2	Estimasi Regresi dengan Pendekatan FEM	68
3.4.3	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	71
3.4.3.1	Deteksi Heterokedastisitas	71
3.4.3.2	Deteksi Autokorelasi	72
3.4.3.3	Deteksi Multikolinieritas	73
3.4.3.4	Deteksi Normalitas	74
3.4.4	Pengujian Hipotesis	74
3.4.4.1	Koefisien Determinasi (R^2)	74
3.4.4.2	Uji F (Simultan).....	75
3.4.4.3	Uji t (Individu).....	76
BAB VI	HASIL DAN PEMBAHASAN	78
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	78
4.1.1	Gambaran Umum Keadaan Geografis Provinsi Jawa Tengah	78
4.1.2	Perkembangan Desentralisasi Fiskal di Indonesia	80
4.1.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah	83
4.1.4	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah	86
4.1.5	Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah	89
4.1.6	Investasi Swasta Provinsi Jawa Tengah	92
4.1.7	Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah	96
4.2	Analisis Data	98
4.2.1	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	99
4.2.1.1	Deteksi Autokorelasi	99
4.2.1.2	Deteksi Heterokedastisitas	100
4.2.1.3	Deteksi Multikolinearitas	101
4.2.1.4	Deteksi Normalitas	103
4.2.2	Hasil Analisis Regresi	104
4.2.3	Pengujian Hipotesis	106
4.2.3.1	Koefisien Determinasi (R^2)	106
4.2.3.2	Uji F (Simultan)	106
4.2.3.3	Uji t (Individu)	107
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	110
BAB V	PENUTUP	117
5.1	Kesimpulan	117
5.2	Saran	119
	DAFTAR PUSTAKA	121
	LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2005-2009 (persen)	4
Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi di Jawa Tengah Tahun 2003-2009	6
Tabel 1.3 Perbandingan Daerah dengan Rata-rata PDRB Tertinggi dan Daerah dengan rata-rata PDRB terendah di Provinsi Jawa Tengah.	9
Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003-2009	11
Tabel 1.5 Jumlah Rata-rata PDRB Tertinggi dan Jumlah Rata-rata PDRB Terendah di Provinsi Jawa Tengah	24
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	55
Tabel 4.1 Perjalanan Desentralisasi di Indonesia	81
Tabel 4.2 Produk Domestik Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (juta rupiah)	84
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (dalam ribu rupiah).....	87
Tabel 4.4 Realisasi Dana Perimbangan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (dalam ribu rupiah)	90
Tabel 4.5 Realisasi Investasi Swasta Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	93
Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	97
Tabel 4.7 Hasil Deteksi Autokorelasi dengan <i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test</i>	100
Tabel 4.8 Hasil Deteksi Heterokedastisitas dengan <i>White Test</i>	101
Tabel 4.9 Hasil Deteksi Multikolinearitas dengan <i>Auxiliary Regression</i>	102
Tabel 4.10 Hasil Regresi Utama Variabel-Variabel Penelitian	105
Tabel 4.11 Nilai t-Statistik Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi	109
Tabel 4.12 Dummy Pertumbuhan Ekonomi	115

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rata-rata PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2009 (juta rupiah)	8
Gambar 1.2 Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009.....	13
Gambar 1.3 Realisasi PMA dan PMDN tahun 2006-2009 Provinsi Jawa Tengah (rupiah).....	16
Gambar 1.4 Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2009.....	19
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	59
Gambar 4.1 Deteksi Normalitas	103

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Tabel Data Penelitian	124
Lampiran B Hasil Regresi Utama Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	128
Lampiran C Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	
Hasil Deteksi Multikolinearitas (<i>Auxiliary Regression Test</i>)	129
Hasil Deteksi Heterokedastisitas (<i>White Test</i>)	131
Hasil Deteksi Autokorelasi (<i>Breusch-Godfrey Test</i>)	132
Hasil Deteksi Normalitas (<i>Jarque-Bera</i>)	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997).

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dilakukan secara berkelanjutan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran

pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari program pemerintah yang dibuat dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan daerah dalam mengelola informasi kedaerahan, membuat pemerintah daerah berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat menjadikan pemerintah agar lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan baik. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat (Kuncoro,2004). Di dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya

“Kebijakan desentralisasi ke daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemerintah daerah, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah”.

Dengan semakin tinggi keinginan pemerintah dalam melakukan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menyangkut pembangunan daerah yaitu mengenai otonomi daerah, seperti yang tercantum di dalam dalam UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diterapkannya Kedua undang-undang ini akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas,

nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Peraturan perundang-undangan ini perlu diberlakukan melihat kebijakan sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah dahulunya kurang mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan dan semakin meningkatnya masalah-masalah mengenai sistem sentralistik membuat pemerintah menyelenggarakan otonomi daerah yang mulai diterapkan pada tahun 2001 sampai saat ini sehingga diharapkan perkembangannya dapat mengatasi hambatan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya untuk dapat mensejahterahkan masyarakatnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bank Dunia (1997) dalam Hadi Sumarsono, dan Sugeng Hadi Utomo (2009) menyebutkan bahwa antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai kemungkinan kondisi sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan;
2. Desentralisasi fiskal mempunyai dampak meningkatkan instabilitas makro ekonomi sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan;
3. Desentralisasi fiskal untuk suatu daerah bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tergantung kesiapan kelembagaan daerah tersebut dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal.

Dampak positif diberlakukannya desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah di pulau Jawa. Pulau

Jawa merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang terdiri dari enam provinsi didalamnya dengan jumlah penduduk tertinggi dan juga memiliki kapasitas fiskal yang tinggi. Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, akan mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Berikut adalah persentase laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2005-2009 :

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
di Pulau Jawa Tahun 2005-2009 (persen)

Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata Pertumbuhan
DKI	6,01	5,95	6,44	6,22	5,01	5,90
Banten	5,88	5,57	6,04	5,77	4,69	5,57
Jawa Barat	5,6	6,02	6,48	5,84	4,29	5,59
Jawa Tengah	5,35	5,33	5,59	5,46	4,71	5,28
DIY	4,73	3,7	4,31	5,02	4,39	4,41
Jawa Timur	5,84	5,8	6,11	5,94	5,01	5,73
Indonesia	5,69	5,5	6,35	6,01	4,55	5,59

Sumber : BPS, statistik Indonesia, berbagai tahun terbitan

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa provinsi DKI memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di bandingkan dengan daerah lain yakni sebesar 5,90 % ; Posisi kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73 %. Kemudian Jawa Barat diposisi ketiga dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,59 % . Provinsi Banten dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,57 % diposisi keempat; Jawa Tengah dengan rata-rata sebesar 5,28 % ; dan yang berada diposisi terakhir yakni DIY dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41%.

Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dari tahun 2005-2009. Sama halnya dengan provinsi di pulau Jawa lainnya yang cenderung mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Provinsi Jawa Tengah hanya bisa menduduki posisi kelima yang merupakan provinsi kedua yang paling terendah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 %. Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas fiskal yang tinggi serta didukung oleh potensi-potensi sumber daya yang dimiliki seharusnya dapat memaksimalkan keuntungannya tersebut untuk dapat bersaing dengan provinsi yang lain. Kapasitas fiskal merupakan kemampuan yang dimiliki daerah dalam proses pembangunan yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, tingkat industri, serta kemampuan lain daerah dalam upaya meningkatkan jumlah PAD yang akan diterima. Ditambah dengan jumlah kabupaten/kota yang terbilang cukup besar yakni sejumlah 35 kabupaten/kota yang secara administratif masuk didalam pemerintahan daerah provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi kondisi riil yang dapat dicapai belum terlalu menampakkan hasil yang memuaskan dalam proses pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diterapkan di provinsi Jawa Tengah belum dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi agar dapat bersaing dengan provinsi lain yang ada di pulau Jawa.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 kabupaten/kota memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi di Jawa Tengah
Tahun 2003-2009

Tahun	PDRB Harga Konstan 2000 (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
2003	113520097,31	-
2004	118574724,04	4,45
2005	123765613,17	5,00
2006	129091684,60	5,32
2007	132584831,40	5,97
2008	141860992,90	5,33
2009	148512940,69	5,20

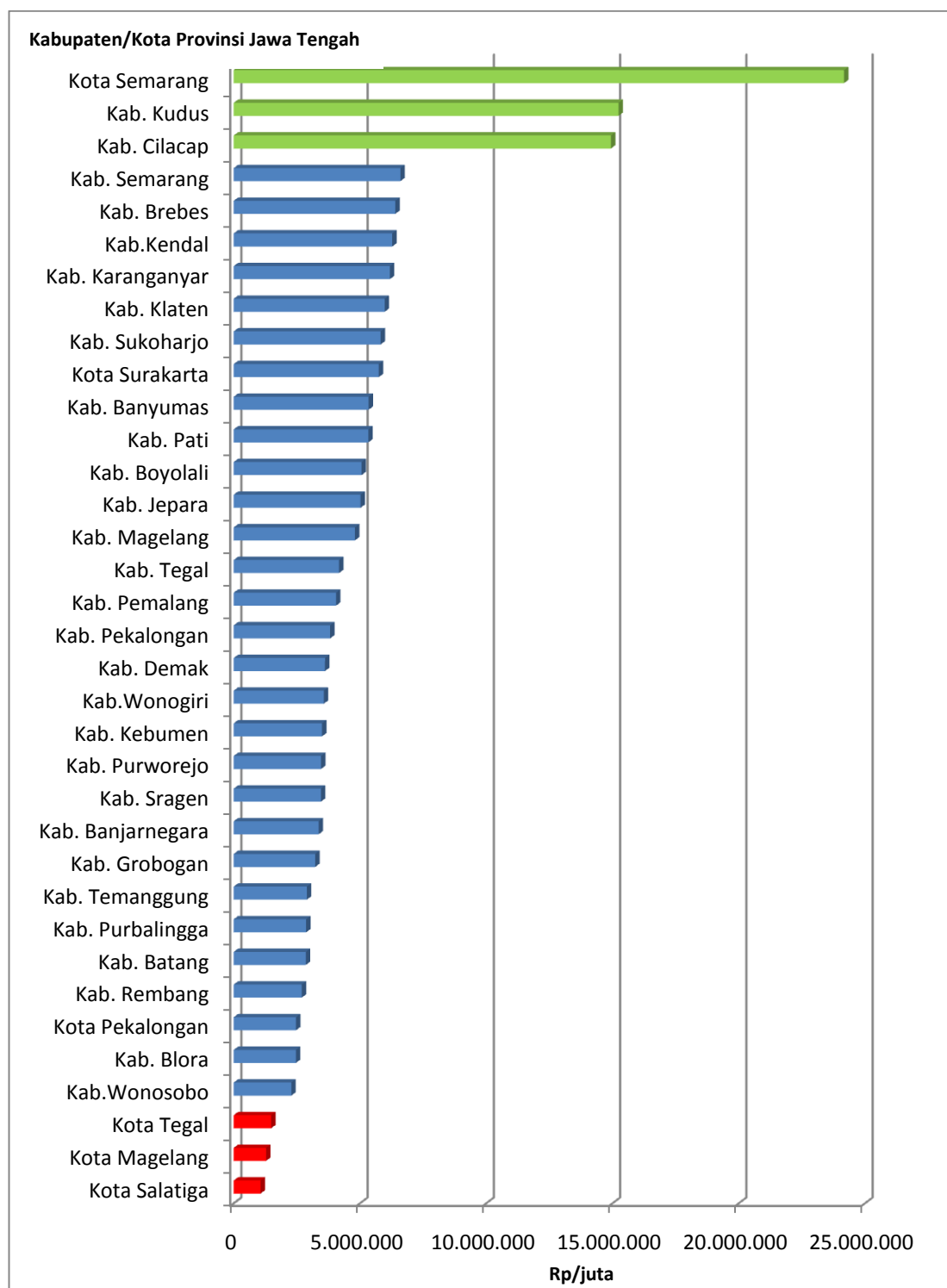
Sumber: BPS dalam angka Provinsi Jawa Tengah, diolah

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah PDRB daerah provinsi Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami kenaikan. Dari tahun 2004-2006, laju pertumbuhan mengalami kenaikan, yakni berkisar antara 4,45 sampai 5,32 %. Pencapaian cukup berhasil terjadi di tahun 2008 dengan persentase laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,97 %. Akan tetapi kenaikannya berangsur turun di tahun 2008 dengan persentase kenaikan sebesar 5,33 % dan ditahun 2009 dengan persentase sebesar 5,20 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian di Jawa Tengah secara keseluruhan mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonominya cenderung positif dan kondisi tersebut akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

Berbeda dengan Todaro (2004) yang menyatakan bahwa, perekonomian yang tinggi disuatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut. Selain itu, tingkat pertumbuhan

ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Peningkatan serta tingginya pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat dari perkembangan jumlah rata-rata PDRB menurut Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Gambar 1.1
Rata-rata PDRB Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2009 (juta rupiah)



Sumber : BPS dalam Angka Provinsi Jawa Tengah, diolah

Tabel 1.3
Perbandingan Daerah dengan Rata-rata PDRB Tertinggi dan Daerah dengan rata-rata PDRB terendah di Provinsi Jawa Tengah

 Daerah dengan Rata-rata PDRB Tertinggi	 Daerah dengan Rata-rata PDRB Terendah
Kota Semarang	Kota Salatiga
Kabupaten Kudus	Kota Magelang
Kabupaten Cilacap	Kota Tegal

Sumber : Data, diolah

Dari Gambar 1.1 dan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa di provinsi Jawa Tengah, hanya terdapat 3 kabupaten/kota dengan jumlah PDRB diatas rata-rata PDRB yang ada di provinsi Jawa Tengah yaitu kabupaten Cilacap dengan rata-rata sebesar Rp.14.942.513,87 (juta), kemudian kabupaten Kudus dengan rata-rata sebesar Rp. 15.242.667,77 (juta), dan yang memiliki nilai rata-rata terbesar ditempati oleh Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata sebesar Rp. 24.173.153,16 (juta). Sedangkan rata-rata PDRB Kabupaten/Kota terendah dimiliki oleh Kota Salatiga dengan rata-rata berkisar Rp.1.065.374,92 (juta), kemudian Kota Magelang dengan rata-rata Rp.1.283.128,51 (juta) dan Kota Tegal dengan rata-rata sebesar Rp.1.483.687,46 (juta) . Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilakukan di tiap daerah di Jawa tengah juga belum berjalan dengan baik. Kesenjangan pembangunan antar daerah masih terjadi sehingga perlu penanganan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebagai pelaku utama kebijakan desentralisasi fiskal untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah pada dasarnya telah berupaya dalam melaksanakan program otonomi atau desentralisasi fiskal yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Kebijakan desentralisasi fiskal yang baru mulai diterapkan pada tahun 2001 dirasa belum menampakkan hasil yang optimal. Hal ini terbukti melihat masih terjadi kesenjangan antara sesama daerah yang tercermin pada pertumbuhan PDRB yang bervariasi di tiap daerahnya.

Desentralisasi fiskal yang diterapkan tidak serta merta menjadikan seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pertumbuhan PDRB secara bersamaan. Berdasarkan tabel PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2009, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun hanya sebagian wilayah saja yang mengalami peningkatan secara signifikan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan PAD-nya sehingga seharusnya porsi PAD sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas

yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pujiati, 2008).
Perkembangan PAD di provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2003-2009

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah)	Pertumbuhan (%)
2003	1.175.439.519	-
2004	1.266.327.966	7,73
2005	1.436.494.358	13,44
2006	1.902.264.211	32,42
2007	2.104.268.521	10,62
2008	2.339.806.781	11,19
2009	2.573.505.219	9,99

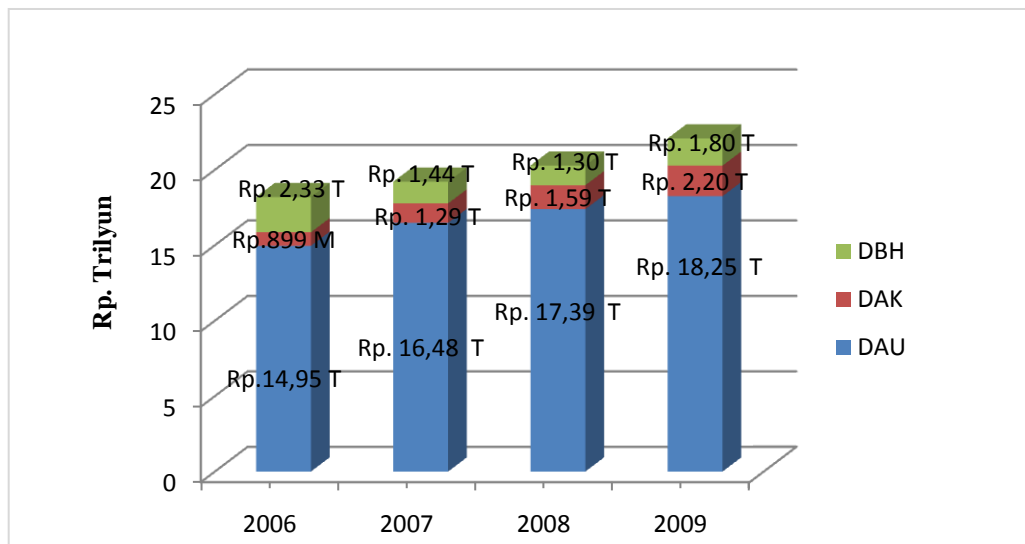
Sumber : BPS dalam Angka Jawa Tengah, diolah

Perkembangan penerimaan daerah di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.4 dimana komposisi pendapatan asli daerah yang digali oleh pemerintah daerah sudah mengalami peningkatan baik dari segi jumlah. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2006 dengan laju pertumbuhan PAD sebesar 32,42%. Ini menunjukkan bahwa penggalan dana oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Akan tetapi, Kuncoro (2004) berpendapat bahwa realitas hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol

pusat terhadap proses pembangunan daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah termasuk rendah jika dibandingkan dengan besarnya subsidi (*grant*) yang diberikan pusat. Senada dengan Mahi (2005) dalam Kusumadewi (2010) berpendapat bahwa peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD akan semakin menurun. Hal ini mengindikasikan komposisi peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan mengalami peningkatan untuk mendanai pelayanan publik. Artinya daerah yang menerima dana perimbangan lebih besar, menunjukkan bahwa PAD yang dapat dihasilkan pada daerah tersebut terbilang kecil dan memiliki potensi sumber daya yang masih kurang, sehingga perlu dana penyeimbang dari pemerintah pusat agar dapat menutupi kekurangan dari potensi sumber daya yang dimiliki pada daerah tersebut. Maka dari itu, keberhasilan desentralisasi fiskal bukan hanya dilihat dari meningkatnya jumlah PAD tetapi juga dari proporsi transfer dana dari pusat yakni berupa dana perimbangan. Berikut ini adalah gambaran perkembangan perimbangan keuangan dari pusat ke daerah dari tahun 2006-2009 provinsi Jawa Tengah :

Gambar 1.2
Perkembangan Dana Perimbangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2009



Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Berdasarkan Gambar 1.2 diketahui bahwa dari tahun 2006-2009 perkembangan dana perimbangan meningkat secara signifikan. Sumbangan terbesar di peroleh provinsi Jawa Tengah dari porsi DAU dengan tren yang meningkat. Besarnya DAU hingga tahun 2009 mencapai Rp. 18,25 trilyun. Besarnya DAU tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2006 dengan porsi DAU sebesar Rp.14,95 trilyun. Sementara itu porsi DAK dari pemerintah pusat terbilang cukup kecil hanya menyumbang sebesar Rp. 899 miliar pada tahun 2006, akan tetapi berangsur naik dengan jumlah porsi DAK sebesar Rp. 2,20 trilyun pada tahun 2009. Berbeda dengan transfer DBH yang trennya justru menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 besarnya DBH mencapai Rp.2,33 trilyun kemudian di tahun 2007 sebesar Rp.1,44 trilyun, dan

di tahun 2008 semakin turun sebesar Rp. 1,30 triliun. Akan tetapi pada tahun 2009 porsi DAK semakin membaik dengan jumlah bagi hasil sebesar Rp 1,80 Trilyun. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa saat pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2006-2009, penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan ekonomi justru mengalami fluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya dana perimbangan yang tinggi, ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan menjadi sangat tinggi dan kemandirian daerah penghasil PAD semakin menurun. Jumlah Dana Perimbangan hasil transfer pemerintah pusat terbilang cukup besar dikarenakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus memperhatikan keseluruhan wilayah kabupaten dan kota yang masuk dalam area pemerintahannya. Sejumlah 29 kabupaten dan 6 kota termasuk jumlah yang sangat besar sehingga dibutuhkan dana yang besar pula untuk mengatasi kekurangan pendapatan daerahnya.

Dengan pencapaian tersebut, diharapkan keseluruhan daerah dapat mengoptimalkan komponen-komponen dan kemampuan yang dimiliki sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat yakni dana perimbangan yang meliputi DAU, DAK, dan DBH dalam dana perimbangan tidak menjadi tolak ukur dalam pendanaan daerah, akan tetapi menjadi motivasi bagi daerah tersebut untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki dan meningkatkan kemandirian soal pendanaan daerah.

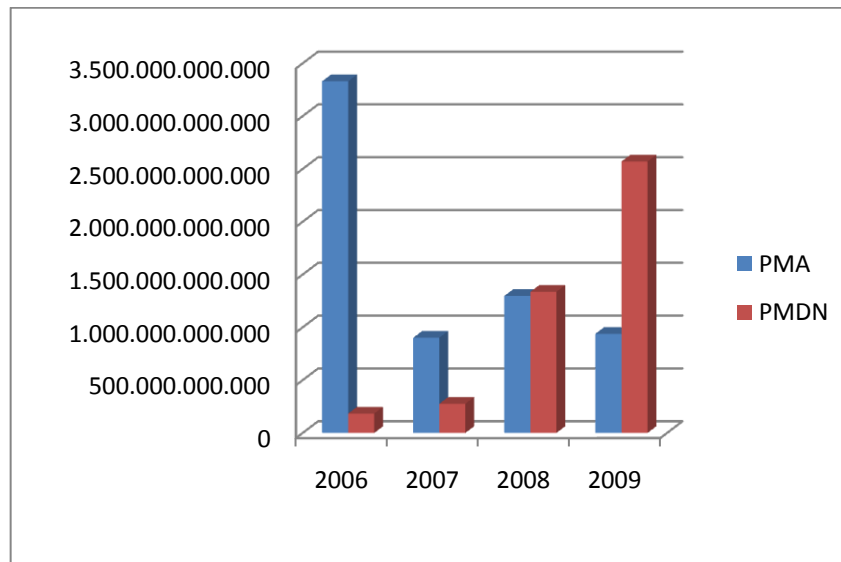
Salah satu tujuan instrumen fiskal dari dana perimbangan yaitu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui belanja pembangunan dan

investasi swasta. Kontribusi belanja pembangunan akan menarik investor untuk dapat berinvestasi di daerah sehingga akan memperluas basis kegiatan ekonomi di berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran.

Kegiatan investasi swasta akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatnya ketersediaan kapasitas produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tumbuhnya ekonomi suatu daerah dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan perkapita.

Investasi swasta yang masuk baik PMA maupun PMDN di Provinsi Jawa Tengah jumlahnya berfluktuatif dan cenderung tinggi. Investasi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Perpindahan modal akan mendorong berkembangnya pembangunan terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lainnya akan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak merata pada setiap daerah menyebabkan kelangkaan modal yang mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan. Berikut adalah gambaran realisasi investasi PMA maupun PMDN Provinsi Jawa Tengah :

Gambar 1.3
Realisasi PMA dan PMDN tahun 2006-2009
Provinsi Jawa Tengah (rupiah)



Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah

Terlihat pada Gambar 1.3 perkembangan yang sangat pesat terjadi pada PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) tahun 2006-2009, dimana pencapaian pada tahun 2009 sampai sebesar Rp. 2.570.249.477.157. Hal tersebut menandakan semakin kuatnya pemodalannya yang bersumber dari dalam negeri dalam menunjang peningkatan perekonomian. Pemasukan yang bersumber dari investasi lokal ini menandakan bahwa pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah dan masyarakatnya telah berupaya untuk berperan serta membangun perekonomian daerah tersebut. Jumlah investasi swasta berupa PMA tahun 2008 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 1.299.667.664.031 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 916.754.515.077, di tahun 2009 kembali turun sebesar Rp. 939.618.024.778. Jumlah proyek yang masuk juga mengalami penurunan, di tahun tahun 2007

proyek yang masuk sejumlah 43 dengan penyerapan tenaga kerja sejumlah 11.929 orang kemudian di tahun berikutnya yaitu tahun 2008 sejumlah 35 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sejumlah 8.630 orang dan turun kembali di tahun 2009 dengan jumlah proyek sebesar 31 proyek dan penyerapan tenaga kerja sebesar 4191 orang . Berbeda dengan investasi PMA, jumlah investasi PMDN di provinsi Jawa Tengah yang masuk tahun 2008 cenderung mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp. 276.469.001.339 di tahun 2007, kemudian Rp. 1.336.340.570.821 di tahun 2008 dan Rp. 2.570.249.477.157 di tahun 2009. Jumlah proyek yang masuk juga memperlihatkan kenaikan yaitu 15 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 6422 orang di tahun 2008 jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dengan hanya menarik investasi sejumlah 5 proyek . Kota Semarang sebagai *benchmark* untuk Provinsi Jawa Tengah pada nilai investasi USD juga mengalami penurunan dari nilai investasi sebesar USD 17.571.211 di tahun 2007 dan ditahun 2008 mengalami penurunan drastis yaitu dengan nilai investasi sebesar USD 7.015.650. Hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi perekonomian pada tahun 2008 cukup bergejolak dengan adanya krisis global yang melanda seluruh negara di dunia. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif sangat diharapkan karena akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakatnya.

Laju pertumbuhan perekonomian juga menunjukkan tingkat kenaikan GNP riil. Faktor penyebab pertumbuhan GNP riil adalah jumlah sumber daya yang tersedia mengalami perubahan. Sumber daya dalam perekonomian dibagi

menjadi barang modal dan tenaga kerja. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang terdiri dari mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur dan juga mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja yaitu mereka yang bersekolah atau mengurus rumah tangga. Angkatan kerja yang terdiri baik orang yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, mengalami pertumbuhan sepanjang waktu dan dengan demikian menyediakan satu sumber bagi peningkatan produksi (Dornbusch dan Fisher, 1994).

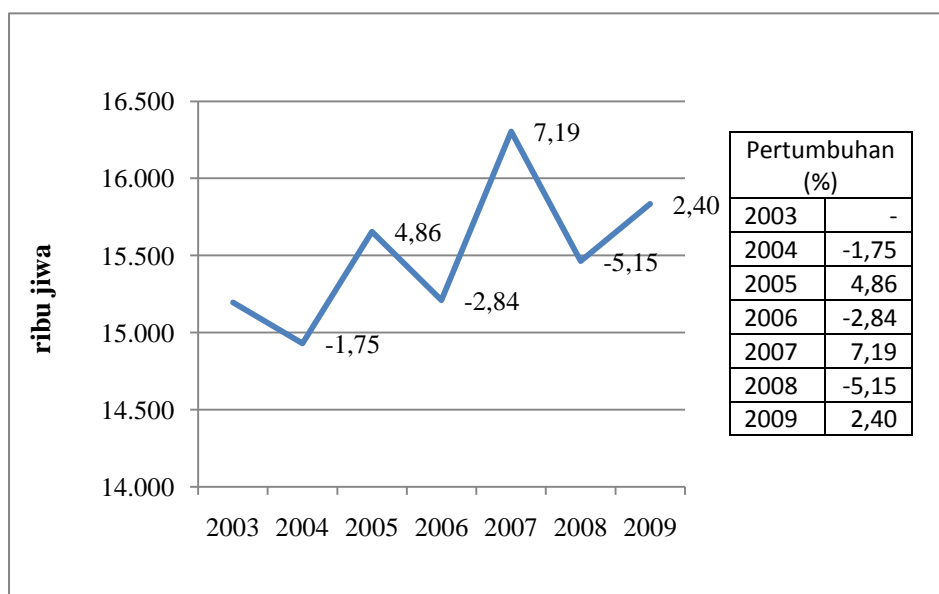
Menurut Parhah (2002) semakin besar jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan di dalam perekonomian. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi peranannya dipengaruhi oleh ketrampilan, tingkat pendidikan, dan daya kreasi yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Semakin tinggi tenaga kerja tersebut memiliki kemampuan itu, maka akan cenderung meningkatkan produktivitasnya. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dalam bentuk meningkatnya output yang dihasilkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan Muhammad Arief Dirgantoro, dkk (2009) menyatakan bahwa angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, apabila angkatan kerja tidak dapat terserap seluruhnya dipasar kerja maka akan terjadi pengangguran.

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, penambahan tersebut akan mendorong suatu daerah untuk menambah produksinya. Pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) yang disertai dengan

tersedianya lapangan pekerjaan akan meningkatkan output perekonomian. Akan tetapi akan berakibat buruk ketika penambahan penduduk tersebut tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang ada, sehingga peningkatan ekonomi yang diharapkan tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja (orang yang bekerja) provinsi Jawa Tengah dari tahun 2003-2009 dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut :

Gambar 1.4
Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2009



Sumber: BPS Jawa Tengah 2003-2009, diolah

Berdasarkan Gambar 1.4 ditunjukkan bahwa perkembangan tenaga kerja pada tahun 2003-2009 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2005 kenaikannya sebesar 4,86 % dan menurun di tahun 2006 sebesar -2,84% . Di tahun berikutnya, yaitu tahun 2007 mengalami kenaikan lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 7,19 % kemudian turun pada tahun 2008 dengan penurunan drastis sebesar -5,15

% dan ditahun 2009 mengalami kenaikan kembali sebesar 2,40 %. Dampak krisis keuangan global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 berdampak pada menurunnya kondisi perekonomian di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Pada fase tersebut faktor-faktor produksi barang ekspor mengalami hambatan, sehingga beban biaya produksi harus dikurangi dengan cara mengurangi sebagian jumlah tenaga kerja. Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan seharusnya dapat lebih fokus menanggulangi permasalahan yang serius ini. Penurunan sekitar -5,15 % ditahun 2008 dinilai sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, kenaikan jumlah tenaga kerja dirasa perlu dalam upaya menaikkan pertumbuhan ekonomi khususnya daerah di era desentralisasi fiskal.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sebelumnya berfokus pada pelaksanaan desentralisasi dengan permasalahan ketimpangan dan kesenjangan. Seperti penelitian Bonet (2006) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal pada negara berkembang (studi kasus Kolombia) berpengaruh terhadap tingginya ketimpangan antar wilayah. Penelitian Waluyo (2007) berpandangan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antara daerah. Persamaan konsep antara pandangan dua kultur negara berkembang yang berbeda dan mengenai belum maksimalnya pengaruh desentralisasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mementahkan konsep dasar diterapkannya desentralisasi fiskal daerah yaitu sebagai alat untuk

memaksimalkan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan di daerah.

Sementara itu, terdapat pandangan berbeda mengenai hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, yaitu penelitian Oates (1993) dan penelitian Woller dan Philips (1998). Menurut Oates (1993) dalam Parhah (2002) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan menciptakan efisiensi ekonomi dan memiliki pengaruh pembentukan dinamis pada pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi yaitu karena pemerintahan lokal mempunyai posisi yang lebih baik daripada pemerintah pusat untuk menyalurkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh pemerintah lokal, yang selanjutnya efisiensi ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan penelitian Woller dan Philips (1998) menyebutkan desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan Davoodi dan Zou (1998) juga memiliki pendapat yang sama bahwa semakin tingginya tingkat desentralisasi fiskal kepada daerah maka akan semakin menurunkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan desentralisasi fiskal dalam beberapa hal menjadi kurang menguntungkan bagi pembangunan. Faktor tersebut antara lain komposisi pengeluaran pemerintah, penetapan pendapatan yang kurang tepat oleh pemerintah daerah, keuntungan efisiensi desentralisasi fiskal yang kurang materiil di negara-negara berkembang dan ketidakcakapan aparatur daerah dalam mengelola potensi daerah dengan maksimal.

Dampak positif desentralisasi fiskal yang terjadi pada suatu negara atau daerah dalam periode tertentu belum bisa dijadikan tolok ukur bahwa transfer keuangan publik antar pemerintah akan memberikan imbas positif pula di daerah lain pada waktu yang sama. (Wibowo, 2008). Sejalan dengan Sjafrizal (2008) yang berpendapat bahwa, pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pembangunan akan menyebabkan setiap daerah, termasuk daerah terbelakang dapat lebih berwenang untuk menggali potensi daerahnya akan meningkatkan pertumbuhan daerahnya dan secara bersamaan kesenjangan pembangunan antar wilayah akan dapat pula dikurangi.

Banyaknya hasil studi yang berbeda-beda mengenai kebijakan desentralisasi ini, menarik peneliti untuk mencoba menganalisis kembali penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan indikator-indikator yang sesuai, yang dapat memperjelas penjelasan mengenai apakah desentralisasi fiskal yang diterapkan akan benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, khususnya di kabupaten/kota di Jawa Tengah sebagai objek penelitian bagi peneliti. Pengambilan lokasi di Jawa Tengah dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa tengah termasuk salah satu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang masih tertinggal dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya yang ada berada di pulau Jawa antara lain DKI, Banten, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi yang sudah dilaksanakan belum maksimal dilakukan, melihat Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terbesar di pulau Jawa yang mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi sebagai pendorong bagi penerimaan daerah yang akan diterima. Hal ini

yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul tentang “ **Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)** ”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan pendorong bagi peningkatan perekonomian di suatu daerah. Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah terbesar di Pulau Jawa dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan jumlah wilayah terbanyak kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Timur yakni sebesar 35 kabupaten/kota memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerahnya untuk mengelola potensi sumber daya di tiap daerah. Akan tetapi kondisi riil yang ada menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah dengan pertumbuhan PDRB yang semakin meningkat dari tahun ke tahun masih dinilai tertinggal dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Kesenjangan antar daerah masih terjadi dengan hanya terdapat 3 wilayah dengan jumlah PDRB diatas rata-rata PDRB di provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, dan Kota Semarang. Kabupaten dan kota lainnya termasuk dalam kategori dibawah rata-rata. Dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5
Jumlah Rata-rata PDRB Tertinggi dan Jumlah Rata-rata PDRB
Terendah di Provinsi Jawa Tengah

Daerah dengan Rata-rata PDRB Tertinggi	Rata-rata PDRB (juta rupiah)	Daerah dengan Rata-rata PDRB Terendah	Rata-rata PDRB (juta rupiah)
Kota Semarang	Rp.24.173.153,16	Kota Salatiga	Rp.1.065.374,92
Kabupaten Kudus	Rp.15.242.667,77	Kota Magelang	Rp.1.283.128,51
Kabupaten Cilacap	Rp.14.942.513,87	Kota Tegal	Rp. 1.483.687,46

Sumber : data, diolah

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa kesenjangan antara daerah dengan rata-rata PDRB tertinggi dan daerah dengan rata-rata terendah posisinya sangat jauh sehingga menyebabkan penyebaran pertumbuhan ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat di era desentralisasi belum tercapai. Dalam hal ini dibutuhkan peningkatan jumlah PAD dan dana perimbangan sebagai indikator pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal guna mendorong perekonomian dan pemerataan daerah. Peningkatan yang disertai dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi akan menarik sejumlah investor untuk berinvestasi ke daerah dan akan berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mengatasi disparitas pendapatan yang terjadi di daerah.

2. Adanya ketidakkonsistenan penelitian terdahulu (research gap) tentang hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu antara lain perbedaan pandangan antara penelitian Oates (1993) dan penelitian Woller dan Philips (1998). Oates (1993) menyebutkan bahwa desentralisasi

fiskal akan menciptakan efisiensi ekonomi dan berpengaruh terhadap pembentukan dinamis pada pertumbuhan ekonomi. Berbeda hal dengan Woller dan Philips (1998) yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan yang mendasar tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan komponen-komponen desentralisasi fiskal yang juga sebagai indikator bagi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah
3. Bagaimana pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah
4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Adapun Kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya daerah provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian dalam upaya mendorong perekonomian daerah sehingga proses kebijakan desentralisasi fiskal ke daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dan sumbangan pemikiran tentang pengembangan ekonomi publik, pembangunan, dan otonomi daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi dengan lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah pemilihan judul penelitian yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi fiskal, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan dari penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, adapun teori yang akan diangkat dalam penelitian yaitu teori dasar pertumbuhan ekonomi, yang meliputi teori pertumbuhan ekonomi klasik, teori Adam Smith (1723-1790), teori Solow Swan, dan teori Harrod Domar. Kemudian akan dibahas juga penjelasan umum mengenai variabel-variabel yang akan diambil, pengembangan konsep kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel-variabel penelitian, penjelasan mengenai jenis dan sumber data, dan metode analisis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat akan dijelaskan mengenai hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, hasil analisis data panel yang mencakup 35 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah, hasil perhitungan data dengan alat analisis regresi OLS (*Ordinary Least Square*), dan interpretasi hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab kelima yang merupakan bab penutup, akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran setelah dilakukan penelitian. Kesimpulan adalah penjelasan singkat tentang hasil dari penelitian yang telah dirangkum dan saran merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Berbagai teori yang akan dikemukakan adalah merupakan dasar dalam perumusan hipotesis dan landasan dalam melakukan analisis penelitian ini. Dalam landasan teori ini akan dibahas mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia, hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah (komponen desentralisasi fiskal), tenaga kerja, serta investasi dan infrastruktur daerah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori pertumbuhan, antara lain teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan Adam Smith (1723-1790), teori pertumbuhan Solow Swan, dan teori pertumbuhan Harrod Domar.

Disamping itu, untuk dapat membandingkan hasil-hasil penelitian sejenisnya atau yang memiliki tema hampir sama secara empiris, maka dilengkapi juga dengan beberapa penelitian terdahulu tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut kemudian digunakan menjadi acuan serta pembanding dalam penelitian ini.

2.1.1 Desentralisasi fiskal di Indonesia

Definisi desentralisasi menurut UU No.32 tahun 2004 :

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat.

Desentralisasi terfokus pada tingkat kabupaten dan kota. Kedua pemerintahan tersebut berada pada level ketiga setelah pemerintah pusat dan provinsi. Beberapa pengamat menyarankan bahwa desentralisasi harus dilaksanakan pada tingkat provinsi karena provinsi dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menangani seluruh tanggung jawab yang dilimpahkan dari pada kabupaten dan kota. Walaupun demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah pusat merasa tidak diuntungkan secara politis jika harus membentuk pemerintahan otonom provinsi yang kuat. Alasannya adalah akan menjadi potensi yang disintegrasi yang semakin kuat (Arsyad,2004)

Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi Simanjuntak (2001) dalam Pujiati (2008): (1) Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah (2) Tidak dapat dipraktikkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistis untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia (3) Pengetahuan lokal (*local knowledge*), mereka yang berada

pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuat kebijakan pada tingkat lokal.

Menurut pasal 14 UU No. 32 tahun 2004, Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pada hakekatnya, terdapat tiga prinsip dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Desentralisasi, yaitu adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota sehingga otonomi lebih dititikberatkan pada daerah tersebut.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sementara itu Bahl (1998) mengemukakan adanya prinsip-prinsip untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, yaitu

1. Desentralisasi fiskal adalah sebuah sistem yang komprehensif yang melibatkan level pemerintahan dan mendukung desentralisasi secara umum.
2. Prinsip *money follow function*, dimana pelimpahan wewenang harus diikuti dengan anggaran yang memadai untuk melaksanakan wewenang tersebut.
3. Adanya kemampuan yang kuat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi dari pemerintah pusat.
4. Harus memperhatikan karakteristik dan kemampuan masing-masing daerah dalam memberikan wewenang.
5. Harus ada *taxing power* yang kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas desentralisasi.
6. Pemerintah pusat harus konsisten dalam melaksanakan desentralisasi dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Dibuat sesederhana mungkin dengan formula yang tidak rumit terutama dalam pelimpahan wewenang.
8. Desain dana perimbangan harus sesuai dengan tujuan dari desentralisasi fiskal.
9. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan keperntingan-kepentingan dari tiap level pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang.
10. Sistem yang dikembangkan dalam dana perimbangan bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

11. Harus ada daerah yang sukses dan menjadi daerah percontohan untuk pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dari beberapa uraian di atas, desentralisasi fiskal adalah sebagai konsekuensi dari adanya pelimpahan wewenang sehingga daerah juga lebih leluasa untuk mendapatkan anggaran lebih untuk melaksanakan tugas desentralisasi. Pemerintah daerah dalam meningkatkan anggaran bisa melalui optimalisasi penerimaan daerah sendiri dan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

2.1.2 Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan teori Tiebout dalam (Sumarsono dan Hadi Utomo,2009) yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Kondisi peningkatan pelayanan barang publik ini dalam kaitannya hubungan antar daerah otonom akan memberikan kondisi kompetisi persaingan antar kabupaten/kota untuk memaksimalkan kepuasan bagi masyarakat. Penyebab mendasar dari peningkatan kemampuan tersebut adalah karena pemerintah daerah dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakatnya, sehingga program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan. Lebih jauh Tiebout menyatakan bahwa, adanya kebijakan desentralisasi fiskal, secara tidak langsung memunculkan kompetisi antar daerah otonom dalam meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, dimana daerah dengan pelayanan yang baik akan memaksimalkan utilitas masyarakat. Senada dengan Davoodi dan Zou (1998) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan memunculkan kompetisi atau persaingan antar daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesamaan pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan program yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya.

Oates (1993) menyatakan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan *outcome* dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta karena makin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Secara teori, desentralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Tanggung jawab fiskal yang semakin besar oleh Pemda dapat menstimulus pembangunan. Hal ini akan berdampak pada hubungan positif yang akan terjadi antara pendelegasian fiskal yang semakin besar dengan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah. Adanya desentralisasi fiskal akan berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi. (Wibowo, 2008).

2.1.3 Penerimaan Daerah (Komponen Desentralisasi Fiskal)

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut undang-undang No.33 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan untuk mendanai daerah (Simanjuntak, 2005). Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.3.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. pengembangan ekonomi lokal. Adapun jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut :

2.1.3.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP). Dana bagi hasil dibagi berdasarkan persentase tertentu bagi pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan yang dibagi dalam porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Penerimaan yang di bagi hasilkan terdiri atas :

1. Penerimaan Pajak :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. PPh Orang Pribadi
2. Penerimaan Bukan Pajak :
 - a. Sektor Kehutanan
 - b. Sektor Pertambangan Umum
 - c. Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam
 - d. Sektor Perikanan

2.1.3.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Umum merupakan *block grants* yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara pemerintah daerah. Secara definisi, DAU dapat diartikan sebagai berikut :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang mengalokasikan didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal Gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal balance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah
3. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menentralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh Daerah.

2.1.3.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi:

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan yang kurang memadai.
4. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

2.1.3.3 Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pusat.

2.1.3.4 Lain-lain pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat (Nurcholis, 2005). Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

2.1.4 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ukuran yang sering di gunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut Todaro (2003), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu :

1. Akumulasi Modal

2. Pertumbuhan Penduduk
3. Kemajuan teknologi

Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (2004) proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

Boediono (1992) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, duapuluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5.1 Teori pertumbuhan ekonomi klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi :

1. Jumlah penduduk,
2. Jumlah stok barang-barang modal,
3. Luas tanah
4. Kekayaan alam, serta
5. Tingkat teknologi yang digunakan

Namun meskipun pertumbuhan ekonomi tergantung dari banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada penambahan penduduk. Ini dikarenakan hukum yang dianut ekonomi klasik yaitu hukum hasil tambahan yang semakin berkurang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak akan terus-menerus berlangsung, apabila penduduk semakin banyak, maka pertumbuhannya bukan menaikkan pertumbuhan ekonomi malah akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitasnya telah menjadi negatif. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila Keadaan ini di capai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan yang tidak berkembang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsisten*)

2.1.5.2 Teori Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the nature and Cause of the wealth of Nation* (1776) mengemukakan tentang konsep pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis.

Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami, di bedakan menjadi dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu :

- a. Pertumbuhan output total
- b. Pertumbuhan penduduk

2.1.5.2.1 Pertumbuhan Output total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga, yaitu :

1. Sumber daya alam yang tersedia
2. Sumber daya insani (atau jumlah penduduk)
3. Stok barang yang ada

Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah Sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai “batas maksimum” dari sumber daya alam).

Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang

dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, maka semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita.

2.1.5.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat.

Tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja (D_L) tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja (S_L). Sementara itu permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja di tentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

2.1.5.3 Teori Harrod-Domar

Teori ini mengembangkan analisis keynes dengan dengan memasukan masalah-masalah ekonomi jangka panjang, serta berusaha menunjukkan syarat

yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (*steady growth*). Teori Harrod-Domar memiliki beberapa asumsi yaitu :

1. Perekonomian dalam keadaan full employment dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap , demikian juga dengan rasio pertambahan modal output (*capital output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio = ICOR*).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatannya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (seperti gedung, peralatan, dan material) yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi yang baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (k) dengan total output (Y), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal output tersebut, hubungan ini dikenal dengan istilah rasio-modal output (COR).

2.1.5.4 Teori Solow-Swan

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini berdasarkan analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Selanjutnya, menurut teori ini rasio modal-output (COR) dapat berubah dan bersifat dinamis. Untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, dan sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu

Teori pertumbuhan Solow-Swan menggunakan pendekatan fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglass yang dikenal dengan sebutan fungsi produksi *Cobb-Dougllass*. Fungsi tersebut dituliskan dalam persamaan sebagai berikut

$$Q_t = T_t^a \cdot K_t \cdot L_t^b \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana :

Q_t = tingkat produksi pada tahun t

T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

a = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

b = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Nilai T_t , a dan b bisa diestimasi secara empiris tetapi pada umumnya nilai a dan b ditentukan besarnya dengan menganggap bahwa $a + b = 1$ yang berarti bahwa a dan b nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai a dan b ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

2.1.6 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut BPS penduduk berumur sepuluh keatas terbagi sebagai tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja apabila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka (Mulyadi Subri, 2003).

Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

2.1.7 Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja

mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Menurut Nicholson W. (1991) dinyatakan bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.

Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal Physical Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

2.1.8 Investasi

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran

masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Musgrave dalam Mangkoesoebroto (1998) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Untuk dapat memulai pembangunan ekonomi dibutuhkan perencanaan ekonomi. Melalui perencanaan pembangunan berbagai kegiatan dapat diselaraskan dan arah pembangunan ekonomi jangka panjang dapat ditentukan. Melalui perencanaan dapat juga ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan. Dalam perencanaan pembangunan perlu ditetapkan beberapa hal berikut (1) tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, (2) tingkat tabungan dan investasi yang perlu diwujudkan, (3) peranan sektor swasta dan pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut, (4) perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dan wilayah yang perlu dilakukan, dan (5) jumlah pembelanjaan dan sumber keuangan yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang diterapkan (Sukirno, 1994).

2.1.9 Investasi Swasta dan Infrastruktur Daerah

Dalam membiayai investasi infrastruktur daerah, perlu juga mengatur sumber daya dari sektor swasta. Hal ini membutuhkan pembentukan kelembagaan dan peraturan lingkungan yang dapat menarik investasi swasta dalam bidang infrastruktur, merubah hukum dan peraturan; mengenalkan konsep pemberian harga yang merefleksikan biaya (*cost-reflective pricing*); dan menyediakan prosedur dan proses privatisasi atau disinvestasi yang transparan. Reformasi semacam ini juga berkontribusi dalam meningkatkan keakuntabilisan sektor publik dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Sebagai contoh, dengan menciptakan kompetisi yang transparan diantara pihak swasta untuk menyediakan layanan publik, diharapkan dapat membantu mengatasi aspek korupsi yang mungkin terjadi. Meningkatkan kompetisi dapat meningkatkan mutu dan efisiensi serta pengurangan harga di daerah-daerah yang didominasi perusahaan daerah yang tidak efisien. Selain itu juga, pengenalan konsep sanksi yang didukung oleh bantuan yang berdasarkan *output-based* akan membantu meningkatkan akses terhadap layanan umum dengan harga terendah. Secara umum, partisipasi swasta yang efisien dapat membebaskan beban fiskal di pemerintah daerah dan membebaskan sumber daya umum untuk program - program prioritas. (Agustino,2005)

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti. Adapun penelitian

terdahulu yang meneliti tentang desentralisasi fiskal yakni antara lain Kusumadewi (2010) yang meneliti desentralisasi fiskal di tingkat provinsi, Parhah (2002) meneliti desentralisasi fiskal di Indonesia dengan mengadopsi penelitian Asai Sakata, Pujiati (2008) yang meneliti dampak desentralisasi di wilayah karasidenan Semarang , dan Yulian Rinawaty dkk (2009) yang melibatkan dana perimbangan sebagai komponen utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah Sulawesi Tengah.

Adapun perbedaan utama yang mendasari studi ini dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus perhatian yang dilakukan terhadap daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Daerah kabupaten/kota dalam hal ini dianggap lebih mengetahui tingkat kemampuan dan potensi masyarakat. Kemudian penggunaan data panel dengan periode 5 tahun penelitian dapat diketahui perkembangan yang akan terjadi di masing-masing daerah yang ada di provinsi Jawa Tengah. Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya dapat dijelaskan pada penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Kusumadewi (2010) menyimpulkan bahwa dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi tergolong kecil. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi dirasa kurang tepat dalam

menempatkan dana sehingga tidak menciptakan efek multiplier untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta dan tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi akan tetapi masih dibutuhkan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas dan kinerjanya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

2. Parhah (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui dampak desentralisasi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kontribusi desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu menunjukkan hubungan yang positif antara kebijakan desentralisasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Akai Sakata (2002) yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu diterapkan di Indonesia mengingat kebijakan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2001, sehingga perlu adanya penyesuaian.
3. Dalam penelitian lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pujiati (2008) dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di karasidenan Semarang era Desentralisasi Fiskal” dengan menggunakan beberapa variabel yaitu sumber penerimaan daerah antara lain DAU, PAD, dan DBH , peneliti menemukan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini tidak mendukung teori pertumbuhan Neo Klasik yang beranggapan bahwa modal akan mempercepat pertumbuhan. Hal ini

membuktikan meskipun ada keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah, daerah belum dapat menetapkan skala prioritas pembangunan daerah secara optimal atas sektor-sektor pembangunan. Penetapan skala prioritas pembangunan akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Sementara itu, penelitian Yulian Rinawaty dkk (2009) yang menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah provinsi Sulawesi Tengah, menemukan bahwa dana perimbangan secara keseluruhan yang melibatkan komponen-komponenya yaitu antara lain DAU, DAK, DBH berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul, Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
<p>1. Pengaruh Desentralisasi fiskal di Tingkat Provinsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah analisis data panel 1999-2008 (Indriasari Kusumadewi, 2010)</p>	<p>mengetahui pengaruh Dana Perimbangan, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia</p>	<p>DV: PDRB IDV: Dana Perimbangan (DPRasio), Investasi swasta (Inv), Tenaga kerja (TK)</p>	$\text{LnPDRB} = \gamma_0 + \gamma_1 + \text{DPRasio} + \gamma_2 \text{Ln}v + \gamma_3 \text{LnTK} + \varepsilon$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Perimbangan provinsi sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ditingkat provinsi 2. Investasi swasta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi 3. Tenaga kerja berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi

<p>2. Kontribusi Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Siti Parhah, 2002)</p>	<p>a. Mengetahui seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia</p>	<p>DV= Tingkat PDRB(GSP)</p> <p>IDV=Jumlah Penduduk (POP),tingkat pendidikan (EDUC) sebagai <i>variable kontrol</i> , tingkat PDRB tahun sebelumnya (ΔGSP₋₁), Koefisien Gini, dan Ekspor-impor</p> <p>Indikator Desentralisasi Fiskal (Desentralization_i) = Penerimaan Pemerintah, Pengeluaran pemerintah, dan PAD</p>	<p>$GSP_i = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Desentralization}_i + X_i \beta + \varepsilon_i$ $i = 1, \dots, 30$</p> <p>$\beta = \text{variable kontrol}$</p> <p>Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data cross-section (Akai dan Sakata, 2002)</p>	<p>Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi</p>
--	--	--	--	--

<p>3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di karasidenan Semarang era Desentralisasi Fiskal (Amin Pujiati, 2008)</p>	<p>a. Mengestimasi pengaruh variabel keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di wilayah Karesidenan Semarang</p> <p>b. Mengestimasi pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di wilayah Karesidenan Semarang.</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut dasar harga konstan tahun 2000, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Tenaga Kerja</p>	<p>Metode GLS (Generalized Least Squares) dipilih dalam penelitian ini karena adanya nilai lebih yang dimiliki oleh GLS dibandingkan OLS dalam mengestimasi parameter regresi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 4. Tenaga kerja (TK) sebagai faktor penting mempercepat pertumbuhan ekonom mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Bertambahnya tenaga produktif akan meningkatkan output sehingga memacu pertumbuhan ekonomi.
---	--	---	--	--

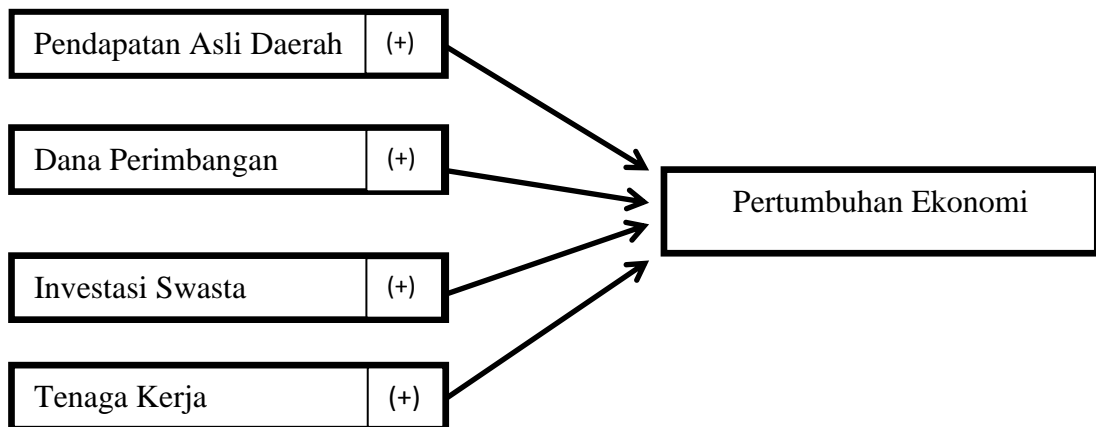
<p>4. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah (Yulian Rinawaty dkk, 2009)</p>	<p>a. Menganalisis pengaruh dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap investasi swasta</p> <p>b. Menganalisis pengaruh dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah</p> <p>c. Menganalisis pengaruh dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta.</p>	<p>DV: Pertumbuhan Ekonomi(Z)</p> <p>IDV: Dana Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3)</p>	<p>Alat analisis:</p> $Z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. 2. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta.
--	---	--	---	---

Sumber : Disarikan Dari Beberapa Jurnal dan Tesis

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teori



Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi sebagai objek utama penelitian dan juga sebagai variabel dependen penelitian. Dan variabel lainnya sebagai variabel independen yakni antara lain : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja. Pemberlakuan sistem desentralisasi fiskal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah baik pusat maupun daerah berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah berupa PAD dan Dana Perimbangan. Jika peningkatan PAD berdampak buruk terhadap

perekonomian maka belum dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD merupakan keberhasilan pembangunan di era desentralisasi fiskal. Untuk itu diperlukan dana perimbangan sebagai penyeimbang dari melemahnya jumlah PAD yang dihasilkan. Faktor-faktor lainnya seperti investasi swasta dan tenaga kerja juga merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin berkembang suatu daerah akan menarik investasi khususnya investasi swasta untuk masuk ke daerah tersebut. Sama halnya tenaga kerja, kualitas tenaga kerja yang dimiliki suatu daerah juga mempunyai dampak terhadap penciptaan output produksi yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi (Kusumadewi, 2010).

Desentralisasi fiskal diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan yang dahulunya bersifat sentralistik. Maka dari itu penetapan kebijakan desentralisasi fiskal menjadi momentum bagi masyarakat dan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan pendanaan daerah yang lebih proporsional dan merata disetiap daerah khususnya daerah provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di duga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
2. Dana perimbangan di duga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
3. Investasi swasta di duga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
4. Tenaga kerja di duga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan empat variabel independen (bebas). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Variabel dependen (variabel terikat), yaitu pertumbuhan ekonomi.
- Variabel independen (variabel bebas) antara lain : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja.

Dalam penelitian ini ditambahkan variabel *dummy cross section* sebagai variabel boneka yang terdiri dari 34 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan 1 daerah dijadikan sebagai *benchmark* (daerah acuan). Pada penelitian ini benchmark yang dipakai yaitu Kota Semarang dimana pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Penggunaan variabel dummy untuk melihat perbedaan pertumbuhan antara pusat pertumbuhan dan daerah lainnya.

3.1.2 Definisi Operasional

- Pertumbuhan ekonomi : perkembangan kegiatan ekonomi yang dilihat dari meningkatnya PDRB kabupaten/kota. PDRB yang digunakan dalam

penelitian ini adalah PDRB dasar harga konstan tahun 2000 (dalam satuan rupiah).

- Pendapatan Asli Daerah : sumber PAD yang berasal dari total pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah provinsi Jawa Tengah (dalam satuan rupiah).
- Dana Perimbangan : dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akumulasi keseluruhan total sumber pendanaan dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH provinsi Jawa Tengah (dalam satuan rupiah).
- Investasi swasta dinyatakan dengan total realisasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah (dalam satuan rupiah).
- Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas baik yang bekerja selama seminggu yang lalu di kabupaten/kota di Jawa Tengah (dalam satuan jiwa).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data panel (pooling data) atau data longitudinal. Data panel adalah sekelompok data individu yang diteliti selama rentang waktu tertentu.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu tahun 2005-2009 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Barat
2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kurun waktu tahun 2005-2009 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Tengah.
3. Data dana perimbangan pada kurun waktu 2005-2009 bersumber dari kantor BPS Provinsi Jawa Tengah
4. Data tenaga kerja pada kurun waktu tahun 2005-2009 bersumber dari kantor BPS Propinsi Jawa Tengah.
5. Data investasi swasta pada kurun waktu 2005-2009 bersumber dari BPMD provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder dari 35 Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009. Pemilihan tahun tersebut dikarenakan pada pertengahan tahun 2008 terjadi krisis global yang menyebabkan penurunan terhadap stabilitas ekonomi di Jawa Tengah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada periode lima tahun tersebut.

3.3 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu data merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur standar. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Arikunto, 2002). Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat pengolahan data dengan menggunakan Eviews 6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1999).

3.4.1 Analisis Regresi

Analisis regresi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja. Variabel independennya yaitu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi di Jawa Tengah. Pada penelitian ini, analisis regresi dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Adapun model persamaan data panel adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.1)$$

dimana

i = merupakan jumlah unit cross section

t = menunjukkan periode waktu tertentu

Model yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah model pertumbuhan ekonomi Solow Swan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor produksi yaitu penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Penelitian ini mengambil tenaga kerja dan akumulasi modal (PAD, Dana Perimbangan, dan Investasi Swasta) sebagai faktor produksi. Penelitian ini berupaya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di era desentralisasi fiskal. Dimana dana perimbangan dan PAD dapat mencerminkan faktor desentralisasi fiskal. Model fungsi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = f(\text{PAD}, \text{DP}, \text{INV}, \text{TK}) \dots\dots\dots(3.2)$$

dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

INV = Investasi Swasta

TK = Tenaga Kerja

Dari persamaan (3.1) dan (3.2) maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{PAD}_{it} + \alpha_2 \text{DP}_{it} + \alpha_3 \text{INV}_{it} + \alpha_4 \text{TK}_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.3)$$

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan metode ekonometrika melalui analisa regresi panel data. Data panel (atau longitudinal data) adalah data yang memiliki dimensi ruang (individu) dan waktu. Dalam data panel, data cross section yang sama diobservasi menurut waktu. Penggabungan data *cross section* dan *time series* dalam studi data panel digunakan untuk mengatasi kelemahan dan menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh model *cross section* dan *time series* murni.

Menurut Gujarati (2003) dalam Waluyo (2007) kelebihan dari penggunaan data panel yaitu, antara lain :

1. Estimasi data panel dapat mempertimbangkan heterogenitas dan memperkenalkan variabel-variabel individu yang lebih spesifik.

2. Data panel dapat memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, kurang kolinearitas antar variabel, derajat bebas yang lebih besar, dan lebih efisien.
3. Data panel lebih sesuai untuk mempelajari dinamika perubahan.
4. Data panel dapat secara lebih baik mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat diamati dalam data cross section dan time series.
5. Data Panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data Panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

3.4.2 Estimasi Regresi dengan Pendekatan FEM (Fixed Effect Model)

Penelitian ini menggunakan metode *fixed effect model* (FEM). Menurut Gujarati (2003) estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada estimasi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan error term, dimana ada beberapa asumsi yaitu :

- a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope (kemiringan) adalah konstan antar waktu (time) dan ruang (space) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu (ruang).
- b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu (wilayah).
- c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar waktu.
- d. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar waktu dan individu (wilayah).

- e. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu (wilayah).
- f. Intersep konstan sebagaimana koefisien slope bervariasi antar waktu.

Metode *fixed effect* menyebutkan bahwa *eit* merupakan kelompok spesifik atau berbeda dalam *constant term* pada model regresi. Bentuk model tersebut biasanya disebut model *Least Squares Dummy Variable* (LSDV). Pengertian *fixed effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara daerah namun intersepnya sama antar waktu (*time invariant*). Disamping itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Dalam penelitian ini menggunakan asumsi *fixed effect* yang kedua dimana koefisien slope konstan, tetapi intersep bervariasi antar individu. Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk menyatakan perbedaan intersep. Penelitian ini menggunakan dummy pertumbuhan ekonomi, untuk melihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara daerah yang rata-rata pertumbuhannya paling tinggi selama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun penelitian (tahun 2005-2009) dengan daerah lainnya, dimana Kota Semarang sebagai wilayah acuan (*benchmark*). Alasan penggunaan Kota Semarang sebagai *benchmark* karena Kota Semarang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten/kota tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Setelah memasukkan variabel dummy wilayah pada maka model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PAD_{it} + \alpha_2 DP_{it} + \alpha_3 INV_{it} + \alpha_4 TK_{it} + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_3 + \dots + \beta_{34} D_{34} + \text{eit} \dots \dots \dots (3.4)$$

dimana :

- Y = tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah
 PAD = pendapatan asli daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah
 DP = dana perimbangan kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah
 INV = investasi swasta kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah
 TK = tenaga kerja kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah
 D1 = dummy Kabupaten Cilacap
 D2 = dummy Kabupaten Banyumas
 D3 = dummy Kabupaten Purbalingga
 D4 = dummy Kabupaten Banjarnegara
 D5 = dummy Kabupaten Kebumen
 D6 = dummy Kabupaten Purworejo
 D7 = dummy Kabupaten Wonosobo
 D8 = dummy Kabupaten Magelang
 D9 = dummy Kabupaten Boyolali
 D10 = dummy Kabupaten Klaten
 D11 = dummy Kabupaten Sukoharjo
 D12 = dummy Kabupaten Wonogiri
 D13 = dummy Kabupaten Karanganyar
 D14 = dummy Kabupaten Sragen
 D15 = dummy Kabupaten Grobogan
 D16 = dummy Kabupaten Blora
 D17 = dummy Kabupaten Rembang

- D18 = dummy Kabupaten Pati
 D19 = dummy Kabupaten Kudus
 D20 = dummy Kabupaten Jepara
 D21 = dummy Kabupaten Demak
 D22 = dummy Kabupaten Semarang
 D23 = dummy Kabupaten Temanggung
 D24 = dummy Kabupaten Kendal
 D25 = dummy Kabupaten Batang
 D26 = dummy Kabupaten Pekalongan
 D27 = dummy Kabupaten Pemalang
 D28 = dummy Kabupaten Tegal
 D29 = dummy Kabupaten Brebes
 D30 = dummy Kota Magelang
 D31 = dummy Kota Surakarta
 D32 = dummy Kota Salatiga
 D33 = dummy Kota Pekalongan
 D34 = dummy Kota Tegal
 α_0 = intersep
 $\alpha_1-\alpha_4$ = koefisien regresi variabel bebas
 $\beta_1-\beta_{34}$ = koefisien dummy wilayah
 eit = komponen error di waktu t untuk unit cross-section i
 i = 1, 2, 3, ..., 34 (data cross-section kabupaten/kota di Jawa Tengah)
 t = 1, 2, 3, 4 (data time-series, tahun 2005-2009)

3.4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

3.4.3.1 Deteksi Heteroskedastisitas

Salah satu penting dalam regresi linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam regresi populasi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan memiliki varians yang sama atau varian setiap gangguan yang

dibatasi untuk nilai tertentu mengenai pada variabel-variabel independen berbentuk nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Dan jika suatu populasi yang dianalisis memiliki gangguan yang variansnya tidak sama maka mengindikasikan terjadinya kasus heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana *error term* tidak memiliki suatu varian yang konstan untuk semua observasi. Masalah heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* daripada time series serta muncul baik pada regresi sederhana maupun regresi berganda.

Beberapa cara untuk menguji adanya heteroskedastisitas salah satunya dengan cara pengujian *White Heteroscedasticity*. Pedoman dari penggunaan model *white* adalah menolak hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model empiris yang sedang diestimasi. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membandingkan nilai $\text{Obs} \cdot R^2$ uji White dengan nilai χ^2 tabel. Jika nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R^2$ -nya lebih besar dari α maka berarti tidak ada heteroskedastisitas, demikian pula sebaliknya.

3.4.3.2 Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah pengujian ada atau tidaknya korelasi antara *error term* pada suatu observasi dengan *error term* pada observasi lain, dengan kata lain munculnya suatu data dapat dipengaruhi oleh data sebelumnya. Masalah autokorelasi lebih sering muncul pada data yang bersifat time series serta dapat terjadi baik pada regresi sederhana maupun regresi berganda. Dampak autokorelasi adalah: (1) variabel terikat pada satu observasi berhubungan dengan dengan observasi lain; (2) penduga OLS memiliki varian yang bias ke bawah

atau *standard error* cenderung lebih kecil; (3) nilai estimasi OLS tidak menghasilkan BLUE karena walaupun tetap linear unbiased tetapi tidak efisien (varian underestimated); serta (4) uji F dan uji t tidak dapat lagi dipercaya, karena *standar error* koefisien regresi terlalu rendah. Salah satu cara untuk menguji adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Breusch – Godfrey* (BG Test) (Gujarati, 1999). Jika nilai probabilitas $Obs \cdot R^2$ -nya lebih besar dari χ^2 tabel maka model tidak ada autokorelasi, demikian pula sebaliknya. Pengujian dengan BG Test dilakukan dengan meregresi variabel pengganggu U_i dengan model autoregressive dengan orde p sebagai berikut :

$$U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \varepsilon_t \dots\dots\dots(3.5)$$

Dengan H_0 adalah $\rho_1 = \rho_2 \dots \rho_p = 0$, dimana koefisien *autoregressive* secara keseluruhan sama dengan nol menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Secara manual apabila χ^2 tabel lebih besar dari nilai $Obs \cdot R^2$ -Squared, maka model tersebut bebas dari autokorelasi.

3.4.3.3 Deteksi Multikolinieritas

Multikolinieritas mengandung arti bahwa ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinieritas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendeteksi adanya

multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 *auxiliary regressions* maka dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

3.4.3.4 Deteksi Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng (*bell – shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Distribusi data tidak normal, karena terdapat nilai ekstrem dalam data yang diambil. (Suliyanto, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan *Jarque-Bera test* (J-B test) yang dilakukan dengan menghitung nilai *skewness* dan *kurtosis* untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai J–B hitung $<$ nilai χ^2 (tabel chi square) , maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya.

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 (regresi majemuk) merupakan ukuran ikhtisar yang mengatakan seberapa baik garis regresi sampai dengan mencocokkan data. Secara verbal, R^2 mengukur proporsi (bagian) atau persentase total variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh model regresi. Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen

amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Gujarati, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekati 1 nilai R^2 berarti dapat dikatakan bahwa model variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen mendekati 100%. Ukuran R^2 akan semakin mengecil jika semakin banyak variabel independen yang digunakan.

3.4.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji distribusi F. Caranya adalah dengan membandingkan antara nilai kritis F (F_{tabel}) dengan nilai F_{hitung} (F RATIO) yang terdapat pada Tabel *Analysis Variance* dari hasil perhitungan. Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara simultan terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel independen. (Algifari, 2000). Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, yaitu variabel-variabel independen yang meliputi pendapatan asli daerah (X1), dana perimbangan (X2), investasi swasta (X3), dan tenaga kerja (X4) secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel independen.

2. H_a : tidak semua koefisien $\beta > 0$, yaitu variabel-variabel independen yang meliputi pendapatan asli daerah (X1), dana perimbangan (X2), investasi swasta (X3), dan tenaga kerja (X4) secara simultan berpengaruh secara signifikan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel independen.

Pengambilan keputusan diambil pada tingkat signifikan (α) = 5% dengan pengujian sebagai berikut :

1. Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_o diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa secara bersama - sama variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) tidak mempengaruhi variabel dependen (Y) secara signifikan.
2. Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_o ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) mempengaruhi variabel dependen (Y) secara signifikan.

3.4.4.3 Uji t (Individu)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi di setiap variabel independen. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam suatu persamaan secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (uji parsial) (Algifari, 2000).

Hipotesis yang digunakan adalah dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5%. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. H_o : $\beta_1 = 0$, variabel pendapatan asli daerah secara parsial tidak mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

- Ha : $\beta_1 > 0$, variabel pendapatan asli daerah secara parsial mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
2. Ho : $\beta_2 = 0$, variabel dana perimbangan secara parsial tidak mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- Ha : $\beta_2 > 0$, variabel dana perimbangan daerah secara parsial mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
3. Ho : $\beta_3 = 0$, variabel investasi swasta secara parsial tidak mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- Ha : $\beta_3 > 0$, variabel investasi swasta daerah secara parsial mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
4. Ho : $\beta_4 = 0$, variabel tenaga kerja secara parsial tidak mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- Ha : $\beta_4 > 0$, variabel tenaga kerja daerah secara parsial mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Pengambilan keputusan diambil pada tingkat signifikan (α) = 5% dengan pengujian sebagai berikut :

1. Jika $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < +t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa secara individu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependennya secara signifikan.
2. Jika $-t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}} > +t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa secara individu variabel independen mempengaruhi variabel dependennya secara signifikan.